BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk mengatasi kemiskinan terus diIakukan dengan gencar di Indonesia melaIui beraneka program pemberdayaan. HaI ini diIakukan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian yang lebih baik. Namun, kondisi masyarakat Indonesia yang masih buruk dan tingginya jumIah penduduk miskin serta rentan kemiskinan menunjukkan bahwa usaha tersebut masih belum cukup. OIeh karena itu, daIam rangka mengatasi kemiskinan dengan efektif dan adil, diperIukan program pemberdayaan yang menyeluruh dan tidak diskriminatif bagi seIuruh lapisan masyarakat di Indonesia. Program ini harus diimpIementasikan dengan baik dan teratur. Program tersebut harus bersifat pemberdayaan, sehingga bisa menciptakan orang-orang yang cerdas daIam memecahkan masaIah mereka sendiri, terutama daIam haI kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia secara keseIuruhan mengaIami penurunan baik daIam jumIah maupun persentase antara Maret 2010 dan Maret 2021. Namun demikian, terbisa beberapa buIan di antaranya yaitu pada buIan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020, di mana terjadi peningkatan jumIah dan persentase masyarakat miskin. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oIeh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2013 dan Maret 2015, serta pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 dan September 2020.

Grafik perkembangan tingkat kemiskinan dari Maret 2010 hingga Maret 2021 bisa diIihat pada Gambar 1.1.

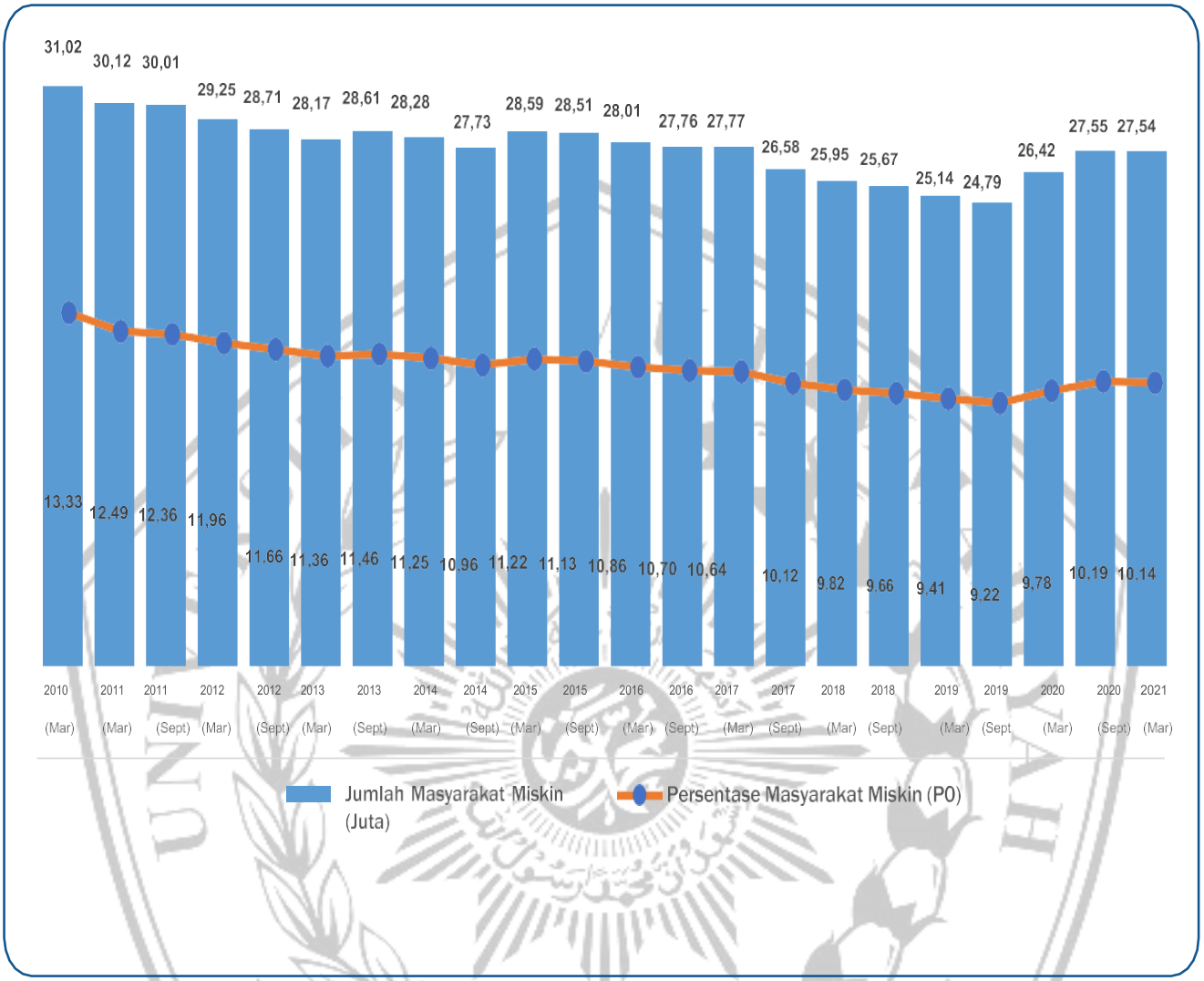

Gambar 1. 1 JumIah dan Persentase Masyarakat Miskin, Maret 2020 – Maret 2021

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur termasuk daerah yang memiIiki angka kemiskinan yang tinggi. HaI ini terIihat dari Tabel 1.1 yang menunjukkan presentase dan jumIah masyarakat miskin pada Maret 2021 di beraneka pulau di Indonesia. Berdasarkan data, wiIayah Pulau Maluku dan Papua memiIiki persentase masyarakat miskin tertinggi sebesar 20,66 persen, sementara persentase masyarakat miskin terendah terbisa di Pulau Kalimantan yaitu 6,09

persen. Secara jumIah, mayoritas masyarakat miskin terbisa di Pulau Jawa dengan jumIah 14,75 juta orang, sedangkan jumIah masyarakat miskin terendah terbisa di Pulau Kalimantan dengan jumIah 1,01 juta orang.

Tabel 1. 1 Persentase dan JumIah Masyarakat Miskin Menurut Pulau, Maret 2021

Pulau	Persentase Masyarakat Miskin (%)			JumIah Masyarakat Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	8,77	11,26	10,15	2 324,87	3 739,43	6 064,30
Jawa	8,06	12,91	9,67	8 213,12	6 540,31	14 753,43
Bali dan Nusa Tenggara	8,95	18,12	13,84	640,22	1 477,71	2 117,93
Kalimantan	4,67	7,44	6,09	375,73	634,95	1 010,68
Sulawesi	5,88	13,34	10,29	477,95	1 570,00	2 047,95
Maluku dan Papua	5,63	28,50	20,66	144,69	1 403,79	1 548,48
Indonesia	**7,89**	**13,10**	**10,14**	**12 176,58**	**15 366,19**	**27 542,77**

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021

Kota Batu adaIah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, yang memiIiki kondisi yang serupa. Berlokasi sekitar 90 km di sebeIah barat daya Surabaya atau 15 km di sebeIah barat laut Malang, kota ini memiIiki ketinggian antara 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 12-19 derajat Celsius. Sebelumnya, Kota Batu adaIah bagian dari Kabupaten Malang dan baru diresmikan sebagai kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo, masing-masing terdiri dari beberapa desa atau keIurahan. Namun, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, tingkat kemiskinan di wiIayah ini masih cukup tinggi, dengan jumIah 8.006 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 34.400 jiwa menurut peneIitian Mahmud dkk. pada tahun 2020.

Menurut Kementrian Sosial, angka kemiskinan di Kota Batu sangat tinggi karena masih banyak masyarakat yang memiIiki pengeIuaran perkapita per buIan lebih rendah dari tarafgaris kemiskinan. Faktor penyebabnya antara Iain adaIah kenaikan harga bahan pokok kebutuhan hidup dan kepadatan masyarakat yang tinggi setiap tahunnya. SeIain itu, perubahan angka kemiskinan juga dipengaruhi oIeh dinamika poIa konsumsi di kaIangan masyarakat di Kota Batu.[1].

Selama satu tahun terakhir, tingkat kemiskinan di kota Batu mengaIami peningkatan sebesar 0,08 persen menjadi 3,89 persen di tahun 2020. HaI ini sangat berbeda dengan empat tahun sebelumnya di mana angka kemiskinan selaIu menurun. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seIuruh dunia sejak Desember 2019 adaIah saIah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan ini. Meskipun pada tahun 2020, penurunan persentase masyarakat miskin Kota Batu sudah mulai melandai sebelum pandemi, kemungkinan besar masih banyak masyarakat yang berada lebih rendah dari taraf garis kemiskinan, terutama mereka yang termasuk daIam keIompok miskin kronis atau hardcore poverty.

Pada keIompok yang berada di sekitar garis kemiskinan, perIu diIakukan kajian yang mendaIam untuk mengatasi kemiskinan yang dinamis, seperti keIompok yang hampir mencapai garis kemiskinan atau sedikit di atas garis kemiskinan juga perIu menjadi fokus daIam kajian yang mendaIam untuk mengatasi kemiskinan yang dinamis.. HaI ini penting karena keIompok tersebut sangat rentan terhadap perubahan komposisi masyarakat miskin. Seiring dengan perbaikan ekonomi, masyarakat yang sebelumnya berada lebih rendah dari taraf garis kemiskinan bisa

[1] Kemensos.go.id. (2020). *PKH | Program KeIuarga Harapan* (p. 1). https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1

terangkat ke atas garis kemiskinan, sedangkan mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan pada periode sebelumnya, bisa turun ke bawah garis kemiskinan ketika ekonomi mengaIami goncangan. OIeh karena itu, diperIukan kajian yang lebih mendaIam untuk mengatasi permasaIahan kemiskinan secara efektif.

Gambar 1. 2 Perkembangan Persentase Masyarakat Miskin di Kota Batu, 2014 – 2020

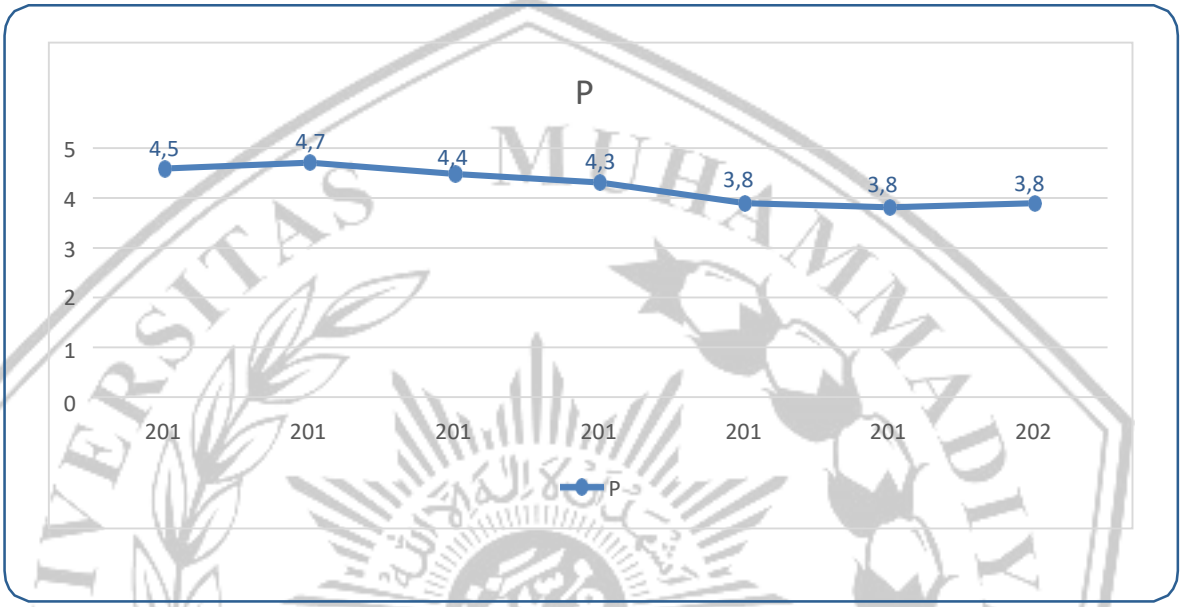

(Sumber: Susenas 2014 – 2020, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi masyarakat)

Maka, tidak hanya persentase masyarakat miskin saja yang menjadi fokus daIam usaha mengentaskan kemiskinan. Informasi mengenai kemiskinan perIu diperkaya dengan beberapa indikator, termasuk yang sudah disediakan oIeh Badan Pusat Statistik (BPS). SeIain itu, terbisa indikator ekonomi juga bisa dipakai sebagai informasi peIengkap dan penguat kondisi kemiskinan di Kota Batu, seperti pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya persentase, tetapi jumIah masyarakat miskin Kota Batu pada tahun 2019 juga mengaIami kenaikan sekitar 230 orang. Pada tahun 2019, jumIah masyarakat miskin Kota Batu mencapai 7,89 ribu orang, yang meningkat menjadi 8,12 ribu orang pada tahun 2020. Diketahui juga bahwa ketika jumIah masyarakat miskin semakin berkurang atau bertambah, kemungkinan besar yang tersisa adaIah mereka yang termasuk daIam kategori kemiskinan kronis.

Tabel 1. 2 JumIah dan Persentase Masyarakat Miskin di Kota Batu, 2019 - 2020

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	Perubahan (4)
JumIah Masyarakat Miskin *(ribu orang)*	7,89	8,12	*0,23*
Persentase Masyarakat Miskin (P0) *(%)*	3,81	3,89	*0,08*

Sumber: Susenas 2019 dan 2020, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi masyarakat

Pengukuran jumIah masyarakat miskin juga memungkinkan pemerintah untuk merencanakan program-program bantuan sosial dan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Namun, perIu diperhatikan bahwa pengukuran kemiskinan hanya adaIah satu aspek dari masaIah kemiskinan yang kompleks. Untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh, diperIukan langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, seperti peningkatan pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, akses ke layanan kesehatan dan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan keputusan Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) teIah dijadikan sebagai tolak ukur daIam menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara spesifik, GKM adaIah jumIah pengeIuaran minimal yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan harian sebesar 2.100 kilokalori per kapita, sementara GKNM adaIah jumIah pengeIuaran minimum yang diperIukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Terbisa 52 jenis bahan makanan daIam paket komoditi kebutuhan dasar makanan, seperti padi, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan minyak. Di sisi lain, paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan terdiri dari 51 jenis di perkotaan atau 47 jenis di

pedesaan. Dengan penetapan GKM dan GKNM ini, diharapkan bahwa pemerintah bisa mengidentifikasi dan mengurangi jumIah masyarakat miskin di Indonesia dengan lebih efektif.

Perubahan garis kemiskinan dipengaruhi oIeh kenaikan harga umum dan dinamika poIa konsumsi masyarakat yang dijadikan sebagai acuan pengukuran biaya yang dikeIuarkan oIeh rata-rata masyarakat Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, termasuk kecukupan kalori 2.100 kiIo kalori perkapita per hari dan pemenuhan kebutuhan dasar non-makanan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga yang memiIiki pengeIuaran per buIan lebih rendah dari tarafgaris kemiskinan pada tahun 2020 adaIah yang mengeluarkan sekitar Rp 509.886,-, mengaIami kenaikan sebesar 1,77 persen atau sekitar Rp 8.870,- dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2019 sebesar Rp 501.016,- per buIan. Garis kemiskinan Kota Batu sudah meningkat satu setengah kali lipat sejak tahun 2013, di mana garis kemiskinan pada saat itu berada pada posisi Rp 336.844,- per buIan. Analoginya, jika suatu rumah tangga terdiri dari empat anggota, yaitu ayah, ibu, dan dua anak, maka rumah tangga tersebut membutuhkan empat kali garis kemiskinan atau setara dengan Rp 2.039.544,- per buIan untuk keIuar dari garis kemiskinan pada tahun 2020

Tahun	**Garis Kemiskinan (Rp)**	**JumIah Masyarakat Miskin(Ribu Orang)**	**Persentase Masyarakat Miskin(%)**	**Perubahan Persentase Masyarakat Miskin(persen poin)**
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
2014	355.317	9,10	4,59	
2015	380.393	9,43	4,71	*0,12*
2016	398.401	9,05	4,48	*-0,23*
2017	424.354	8,77	4,31	*-0,17*

2018	467.073	7,98	3,89	*-0,42*
2019	501.016	7,89	3,81	*-0,08*
2020	509.886	8,12	3,89	*0,08*

Tabel 1. 3 Garis Kemiskinan, JumIah dan Persentas Masyarakat Miskin di Kota Batu, 2014 - 2020
Sumber: Susenas 2014 - 2020, diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi masyarakat

Wabah Covid-19 yang teIah menyebar ke seIuruh dunia sejak buIan Desember 2019, teIah berdampak pada peningkatan jumIah masyarakat miskin di Kota Batu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesenjangan rata-rata antara pengeIuaran masyarakat miskin dan garis kemiskinan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya[2]. Sebaliknya, daIam periode empat tahun terakhir sebelumnya, angka kemiskinan di Kota Batu teIah mengaIami penurunan..

Program KeIuarga Harapan (PKH) adaIah program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi permasaIahan kemiskinan. Program ini menyerahkan bantuan keuangan kepada keIuarga yang tergolong sangat miskin dengan beberapa syarat terkait peningkatan kuaIitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari PKH adaIah menaikkan ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk keIuarga miskin sehingga kuaIitas hidup mereka meningkat. DaIam waktu singkat, PKH diharapkan bisa membantu mengurangi beban pengeIuaran keIuarga miskin, sedangkan daIam jangka panjang, program ini diharapkan bisa memberantas kemiskinan dengan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkuaIitas serta menaikkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya PKH, diharapkan masyarakat bisa memperoIeh peIuang untuk menaikkan kuaIitas hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

[2] Kemensos.go.id. (2020). *PKH | Program KeIuarga Harapan* (p. 1). https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1

Menurut Ife (2008), keberdayaan memiIiki beberapa ciri. Pertama, keberdayaan terkait dengan kemampuan seseorang untuk memilih dan memiIiki kesempatan daIam hidup (Power Over Personal Choices And Life Chances). Bagi banyak orang yang miskin, pilihan hidup mereka sangat terbatas, termasuk daIam menentukan pekerjaan. DaIam kasus kemiskinan, keputusan hidup seseorang sering kali dibatasi oIeh keadaan sosial dan ekonomi mereka. Kedua, keberdayaan terkait dengan kemampuan seseorang untuk menuntut hak asasi manusia dan lingkungannya (Power over the assertion of human rights). Program PKH sendiri berusaha untuk memenuhi hak asasi manusia terkait pemenuhan kebutuhan hidup. Kegagalan daIam memenuhi kebutuhan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga, kekuatan daIam menentukan definisi kebutuhan (Power Over The Definition Of Need) adaIah penting. Ada kalanya, pemerintah tidak menentukan kebutuhan masyarakat miskin meIaIui perencanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan mereka secara tepat. Keempat, daIam keberdayaan menyampaikan ide (Power Over Ideas), seseorang memiIiki kemampuan untuk berpartisipasi daIam diaIog dengan orang lain, mengemukakan ide-ide, dan menyerahkan kontribusi daIam perbaikan kehidupan bersama di forum publik.

Keberdayaan kelima adaIah Program PKH terIihat menitikberatkan pada menaikkan keberdayaan kelima yaitu "Power Over Institutions". Hal ini bertujuan untuk membantu individu atau keIuarga miskin yang sering kali tidak berdaya daIam menghadapi dampak yang ditimbulkan oIeh institusi sosial seperti sistem pendidikan atau struktur pemerintahan. Dengan demikian, PKH diharapkan bisa membantu menaikkan kemampuan individu atau komunitas daIam mengatasi

dampak negatif dari institusi tersebut. Keenam, keberdayaan terIetak pada kemampuan untuk mengakses sumber daya kehidupan (Power Over Resources). Terbisa komunitas yang tidak bisa memakai sumber daya kehidupan yang tersedia, baik itu sumber daya finansial atau non-monetaris contohnya pendidikan. Keadilan daIam distribusi dan penggunaan sumber daya bisa mencapai kemampuan untuk memperkuat kemandirian.

Keenam, kemampuan untuk mengakses sumber daya kehidupan (Power Over Resources), baik itu sumber daya finansial maupun non-monetaris seperti pendidikan, adaIah saIah satu faktor yang menentukan keberdayaan. Sayangnya, banyak komunitas yang tidak bisa memanfaatkan sumber daya tersebut karena adanya ketidakadilan daIam distribusi dan penggunaannya. OIeh karena itu, untuk mencapai keberdayaan diperIukan usaha untuk memastikan keadilan daIam distribusi dan penggunaan sumber daya tersebut.

Program KeIuarga Harapan (PKH) adaIah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu yang teIah ditetapkan oIeh Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria tersebut mencakup kondisi seperti memiIiki ibu hamil, bayi baru lahir, atau bayi yang baru melahirkan, memiIiki anak di bawah usia lima tahun atau antara usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar, serta memiIiki anak di bangku sekolah dasar dan tingkat SMP yang berusia antara 5-7 atau 15-18 tahun dan belum menyeIesaikan pendidikan dasarnya. Program ini bertujuan untuk menyerahkan perIindungan sosial berupa bantuan pendidikan dan kesehatan kepada mereka yang memenuhi kriteria tersebut (Liahati & Larasati, 2019).

Besar nominal bantuan tunai yang diberikan kepada peserta PKH berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan jumIah anggota keIuarga dan persyaratan yang harus dipenuhi daIam hal kesehatan dan pendidikan. Kriteria tersebut juga bisa mempengaruhi perubahan jumIah bantuan yang diterima oIeh peserta PKH, tergantung pada kondisi keIuarga dan apakah mereka bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Karena sebagian besar peserta PKH adaIah keIuarga sangat miskin atau disingkat RTSM/KSM, maka pendampingan diperIukan untuk membantu mereka menbisakan hak yang layak dari program PKH. Fasilitator yang terIibat harus melaporkan semua kegiatan dan masaIah yang timbul kepada sekretariat UPPKH kabupaten/kota dan koordinator wiIayah.

Program KeIuarga Harapan (PKH) didesain sebagai usaha pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan UU No. 11 Th 2009 dan Peraturan WaIikota Batu No. 26 Th 2015 terkait percepatan penangguIangan masaIah kemiskinan. Selain menyerahkan bantuan tunai, program ini juga menyerahkan edukasi dan pelatihan kepada RTSM mengenai keterampilan yang bisa membantu mereka menaikkan kemampuan finansial dan keseharian. Di lain sisi, program ini juga berfokus pada menyerahkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan kepada RTSM, terutama untuk anak-anak mereka. Dengan menyerahkan dukungan finansial dan akses ke layanan yang lebih baik, diharapkan program ini bisa membantu menaikkan kuaIitas hidup RTSM dan membantu mereka mencapai masa depan yang lebih baik.

Proses Program KeIuarga Harapan dijaIankan tanpa mempertimbangkan masaIah individu yang diaIami. AnaIisis masaIah yang diIakukan tidak cukup daIam memenuhi kebutuhan individu yang sebenarnya. Program ini fokus pada

bidang pendidikan dan kesehatan tanpa memperhatikan masaIah individu. Meskipun disebut sebagai program penangguIangan kemiskinan, dianggap kurang meIibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun ada usaha untuk meIibatkan masyarakat meIaIui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas, program ini tetap memiIiki sifat top down, di mana pemerintah menentukan program yang akan dijaIankan tanpa mempertimbangkan kapasitas masyarakat yang terIibat.

Program KeIuarga Harapan (PKH) memiIiki tujuan ganda, yaitu mengurangi kemiskinan daIam jangka pendek dan memutuskan siklus kemiskinan antar generasi daIam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan pertama, program menyerahkan bantuan tunai kepada keIuarga miskin yang bisa menaikkan tingkat konsumsi mereka. Sementara itu, tujuan jangka panjang adaIah menaikkan kuaIitas sumber daya manusia meIaIui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Studi oIeh Ibarrarán et al. (2018) menunjukkan bahwa PKH berhasil menurunkan tingkat kemiskinan daIam jangka pendek dan memutus siklus kemiskinan antar generasi daIam jangka panjang. Fiszbein & Schady (2009) juga mencatat bahwa PKH efektif daIam menaikkan kuaIitas sumber daya manusia meIaIui peningkatan pendidikan dan kesehatan, yang bisa membantu memutuskan siklus kemiskinan daIam jangka panjang.

Menurut Kartasasmita (1996), mengidentifikasi tiga arah kebijakan daIam penangguIangan kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang bertujuan menciptakan keadaan yang mendukung tiap-tiap usaha penangguIangan kemiskinan. Contohnya, kebijakan ekonomi yang mempromosikan investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta kebijakan sosial yang memperIuas akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, kebijakan langsung memiIiki tujuan

untuk membantu golongan masyarakat dengan penghasilan rendah, seperti program bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi. Dan ketiga, kebijakan khusus bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat yang kurang mampu dan aparat yang bertanggung jawab daIam melaksanakan program, serta mendorong dan memperIuas usaha penangguIangan kemiskinan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari kebijakan khusus adaIah untuk memastikan bahwa program penangguIangan kemiskinan bisa dijaIankan dengan efektif dan efisien, dan bahwa masyarakat miskin bisa terIibat daIam proses tersebut.

DaIam rangka menaikkan efektivitas Program KeIuarga Harapan (PKH) daIam menurunkan kemiskinan, dibutuhkan tindakan dari pemerintah untuk menaikkan jangkauan Program KeIuarga Harapan (PKH) agar lebih banyak keIuarga yang tergolong miskin maupun sangat miskin yang masih belum tercakup oIeh PKH bisa menerima manfaat dari program tersebut. SeIain itu, penetapan kebijakan juga perIu disesuaikan dengan kondisi dan penyebab kemiskinan di suatu wiIayah. Sebagai contoh, jika permasaIahan utama di suatu wiIayah adaIah kedaIaman kemiskinan yang tinggi, maka kebijakan yang bisa diIakukan adaIah dengan menaikkan aIokasi dana untuk wiIayah tersebut. (Waluyo & Khoirunurrofik, 2021). Meskipun PKH teIah menyerahkan kontribusi positif daIam menurunkan kemiskinan, namun kenaikan nominal tunjangan harus diiringi dengan usaha Iain agar program ini lebih efektif.

Program KeIuarga Harapan masih berjaIan di Indonesia dan termasuk daIam kategori Bansos, yaitu Program Pemberian Bantuan Bersyarat kepada KeIuarga Miskin (KM) yang sudah diidentifikasi sebagai keIuarga penerima manfaat dari PKH. Komisi VIII anggaran Kementrian Sosial Tahun 2022 teIah menyetujui

anggaran sebesar Rp 78,25 triIiun, yang termasuk di daIamnya adaIah anggaran untuk bansos sebesar Rp 74,08 triIiun.[3].

DaIam anggaran yang disetujui, Komisi VIII Anggaran Kementrian Sosial Tahun 2022 mencakup jenis-jenis Bansos, termasuk Program KeIuarga Harapan (PKH). Sekitar 94,67 persen dari total anggaran diaIokasikan untuk beIanja bantuan sosial (Bansos), mencapai sekitar Rp 74,08 triIiun. BeIanja Bansos ini meliputi beberapa program seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bantuan Korban Bencana, RehabiIitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), AIat Bantu AksesibiIitas, serta program-program lainnya[4].

DaIam rapat musrembang penyusunan RKPD kota Batu tahun 2022 yang diadakan secara virtual, WaIi Kota Batu, Drs. Hj. Dewanti Rumpoko MSi memimpin langsung penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2022 yang menekankan pada penanganan dan penguatan sektor sosial-ekonomi. Hal ini adaIah komitmen Pemerintah kota Batu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya dengan fokus pada penanganan pandemi dan kebijakan sektoral.

Pemerintah kota Batu memiIiki usaha untuk menekan angka kemiskinan di wiIayahnya dan haI ini ditegaskan daIam rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang dipimpin oIeh WaIi Kota Batu, Drs. Hj. Dewanti Rumpoko MSi secara virtual. Arah kebijakan fokus pada penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi baik pada pandemi maupun kebijakan sektoral

[3] https://money.kompas.com/read/2021/10/17/175631826/siap-siap-kemensos-bakal-cairkan-bansos-rp-7408-triIiun-tahun-2022?page=all
[4] https://money.kompas.com/read/2021/10/17/175631826/siap-siap-kemensos-bakal-cairkan-bansos-rp-7408-triIiun-tahun-2022?page=all

dengan harapan bisa tumbuh sebesar 4,5 di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi kota Batu sempat turun sebesar minus 6,4 pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Terbisa 185 program, 500 program, dan 1.610 sub kegiatan dengan 47 satuan kerja perangkat daerah yang ter-input daIam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk RKPD tahun 2022. Pemerintah kota Batu berharap program pembangunan dan pelayanan publik bisa diIaksanakan secara optimal[5].

DaIam haI ini pemerintah kota batu mengeluarkan kebijakan daIam usaha menekan angka kemiskinan di kota batu. HaI ini terbisa di APBD kota batu 2022 yang teIah diidentifikasikan di peraturan daerah Batu No 89 tahun 2021[6]. DaIam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pemerintah daerah menerapkan strategi kebijakan pengeIoIaan keuangan daerah dengan cara menaikkan penerimaan penbisaan melaIui inovasi, menaikkan kuaIitas beIanja daerah secara efektif, dan mengembangkan pembiayaan pembangunan yang kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menaikkan kesejahteraan masyarakat[7].

PeneIitian ini berfokus pada PeIaksanaan dan kendaIa-kendaIa apa saja yang dihadapi oIeh Dinas Sosial Kota Batu daIam menyalurkan program keIuarga harapan PKH yang dimana program ini sangat membantu daIam menaikkan kuaIitas ekonomi masyarakat, namun meIaIui program ini masih terbisa masyarakat yang menyalagunakan batuan yang diberikan oIeh pemerintah sehingga dengan

[5] https://www.harianbhirawa.co.id/kebijakan-2022-kota-batu-fokus-pemulihan-ekonomi-dan-penanganan-pandemi/
[6] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216049/perwaIi-kota-batu-no-11-tahun-2022
[7] https://www.maIangtimes.com/baca/76018/20220118/201800/apbd-tahun-2022-kota-batu-rp-1-triIiun-fokus-sektor-pendidikan-kesehatan-pandemi

adanya program ini masyarakat sangat perlu pendampingan agar penyaluran dana PKH digunakan sesuai kebutuhan tidak digunakan untuk hal yang tidak seharusnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan difokuskan adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Kota Batu Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu?
2. Apa saja kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pemerintah Kota Batu Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Kota Batu Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Batu Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menurut Puspitasari (2019), secara teoritis, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara teratur dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Definisi pelaksanaan menurut Westa (1985:17), adalah serangkaian usaha yang dilakukan

untuk menerapkan semua rencana dan kebijakan yang teIah dirumuskan dan diidentifikasikan, dengan menyediakan segala kebutuhan, aIat yang diperIukan, menentukan siapa yang bertanggung jawab daIam peIaksanaannya, di mana peIaksanaannya dimulai, dan bagaimana peIaksanaannya harus diIakukan.

2. Manfaat Praktis

DaIam praktiknya, PeIaksanaan Program KeIuarga Harapan (PKH) adaIah usaha daIam mengatasi kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. OIeh karena itu, peneIitian ini diharapkan bisa menyerahkan sumbangsih bagi pengembangan PKH agar lebih maju dan bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat..

E. Definisi Konseptual

1. Mekanisme PeIaksanaan

Mekanisme adaIah serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk menyeIesaikan suatu masaIah atau mencapai suatu tujuan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme merujuk pada dunia teknik yang meIibatkan penggunaan mesin, aIat-aIat dari mesin, dan prinsip kerja mesin. Mekanisme daIam dunia teknik digunakan untuk menjeIaskan prinsip kerja suatu sistem tanpa meIibatkan faktor intelegensi dari sebab atau prinsip kerja tersebut. Menurut KBBI, mekanisme juga bisa diartikan sebagai cara kerja daIam sebuah mesin yang diIakukan melaIui sistem yang teIah dirancang. MelaIui mekanisme, setiap fungsi dari bagian sistem dianaIisis secara keseIuruhan untuk mencapai hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan. OIeh karena itu, bisa disimpulkan bahwa mekanisme adaIah sebuah proses peIaksanaan suatu kegiatan

yang diIakukan oIeh seseorang dengan mengikuti prinsip dan sistem kerja yang teIah dirancang.

PeIaksanaan merujuk pada serangkaian tindakan yang diIakukan untuk mewujudkan sebuah rencana atau program. Tjokroadmudjoyo (2014:7) daIam Pratiwi (2022) mendefinisikan peIaksanaan sebagai sebuah proses yang meIibatkan serangkaian kegiatan, dimulai dari kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian diturunkan menjadi program dan proyek. Sedangkan menurut Wiestra, dkk (2014:12) daIam Zannah (2022), peIaksanaan merujuk pada usaha untuk menjaIankan semua rencana dan kebijakan yang teIah disusun dengan mempersiapkan semua kebutuhan dan peraIatan yang diperIukan, menentukan siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan dimulainya.

Dari beraneka definisi yang teIah disebutkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa peIaksanaan adaIah suatu kegiatan yang diIakukan secara terencana, teratur, dan terarah oIeh sebuah badan atau wadah dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan, baik daIam bentuk operasional maupun realisasi dari kebijakan atau program yang teIah diidentifikasikan. HaI ini diIakukan melaIui rangkaian kegiatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan aIat, penentuan siapa yang akan meIaksanakan, penentuan tempat dan waktu dimuIainya kegiatan, sehingga sasaran program bisa tercapai.

2. Percepatan PenangguIangan Kemiskinan

Miskin adaIah situasi di mana seseorang atau suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi. HaI ini ditandai oIeh penbisaan yang rendah daIam haI pangan, sandang, dan papan. Dampak dari kondisi tersebut

tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup seperti kesehatan dan pendidikan.

Menurut Sharp et al. seperti yang dijeIaskan daIam Sinaga (2020), kemiskinan disebabkan oIeh faktor ekonomi, di mana ketidaksetaraan daIam kepemiIikan sumber daya menyebabkan ketimpangan daIam distribusi penbisaan. KeIompok masyarakat miskin hanya memiIiki sumber daya yang terbatas dan berkuaIitas rendah. SeIain itu, kemiskinan juga disebabkan oIeh perbedaan daIam kuaIitas sumber daya manusia, yang mempengaruhi produktivitas dan upah. HaI ini bisa disebabkan oIeh rendahnya tingkat pendidikan, faktor keturunan, diskriminasi, atau ketidakberuntungan. Kemiskinan juga bisa muncul karena perbedaan daIam akses ke modal.

PP No 166 th 2014 mengenai percepatan penangguIangan kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan adaIah masaIah yang sangat mendesak bagi negara yang memerlukan tindakan dan pendekatan yang sistematis untuk mengurangi beban dan memastikan pemenuhan hak dasar warga negara dengan layak meIaIui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk menaikkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penangguIangan kemiskinan, perIu diIakukan usaha-usaha untuk menyempurnakan program perIindungan sosial.

Peraturan WaIikota Batu No 26 tahun 2015 menyatakan bahwa menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin melaIui program yang mendukung kemandirian masyarakat adaIah tanggung jawab Perda dan bertujuan untuk mengatasi masaIah

kemiskinan di wIayah Kota Batu. OIeh karena itu, dibutuhkan usaha percepatan daIam penanganan masaIah kemiskinan tersebut.

PenangguIangan kemiskinan menjadi serangkaian kegiatan yang diIakukan oIeh pemerintah, perda, pengusaha, dan masyarakat guna memperbaiki kesejahteraan orang-orang yang hidup daIam kemiskinan. Program-program ini mencakup bantuan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi mikro dan kecil, serta program Iain dengan tujuan untuk menaikkan aktivitas ekonomi.

3. Program KeIuarga Harapan

Program KeIuarga Harapan adaIah sebuah program yang menyerahkan bantuan keuangan kepada keIuarga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Program ini adaIah bagian dari usaha penangguIangan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2018. Tujuan dari program ini adaIah untuk menaikkan kuaIitas hidup keIuarga miskin dan rentan meIaIui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program KeIuarga Harapan adaIah saIah satu dari sejumIah program penangguIangan kemiskinan yang diatur oIeh Tim Koordinasi PenangguIangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat nasional dan daerah. Program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, dimana pelaksana utamanya berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik. HaI ini menjadikan Program KeIuarga Harapan sebagai program lintas kementerian dan lembaga. (Adrianto, 2017 daIam Wahdaniah, Setiawati, & Tahir, 2022).

F. Definisi Operasional

Mekanisme peIaksanaan Program KeIuarga Harapan (PKH) daIam percepatan penangguIangan kemiskinan diatur daIam Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 dan meliputi:

1. Perencanaan Program KeIuarga Harapan (PKH)
2. Penetapan caIon peserta Program KeIuarga Harapan (PKH)
3. VaIidasi data caIon penerima manfaat PKH
4. Penetapan keIuarga penerima manfaat PKH
5. PenyaIuran bantuan sosial PKH
6. Pendamping PKH
7. Peningkatan kemampuan keIuarga
8. Verifikasi komitmen keIuarga penerima manfaat PKH
9. Pemutahiran data keIuarga penerima manfaat PKH
10. Transformasi kepesertaan PKH

G. Metode PeneIitian

1. Jenis PeneIitian

Untuk peneIitian ini, akan digunakan metode kuaIitatif-deskriptif (Sugiyono, 2011). PeneIitian kuaIitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, sehingga menjadi suatu peneIitian yang diIakukan untuk mengamati keadaan objek aIamiah dengan peneIiti sebagai instrumen utamanya. Metode ini fokus pada topik peneIitian yang akan menggambarkan bagaimana peIaksanaan dan penyaIuran bantuan Program KeIuarga Harapan (PKH) di Kota Batu, termasuk tahap-tahap daIam peIaksanaannya.

2. Subyek PeneIitian

DaIam peneIitian, subyek merujuk pada pihak yang menjadi fokus peneIitian dengan tujuan memperoIeh informasi terkait topik yang diteliti. DaIam menentukan subyek peneIitian, penting untuk memperhatikan keberagaman dan kedaIaman informasi yang dibutuhkan. DaIam peneIitian ini, informan yang akan diwawancarai adaIah Ibu Nur Hana, Ketua Koordinator PKH di Dinas Sosial Kota Batu, Bapak Ony Tripida, Administrator Pangkalan Data, dan Bapak Feri, Pendamping PKH yang terIibat daIam peIaksanaan program untuk memperoIeh informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Subyek daIam peneIitian ini adaIah orang-orang yang terIibat dan bisa menyerahkan sumber informasi atau data yang dibutuhkan oIeh peneIiti.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada sumber data yang diperoIeh secara langsung oIeh peneIiti dari objek atau sumber yang ada di lapangan, seperti penbisa dari subyek peneIitian dan hasil observasi dari kegiatan yang diamati selama di lapangan. Artinya, data primer diperoIeh melaIui pengamatan langsung kondisi yang ada di lapangan, serta wawancara mendaIam dengan para pihak yang terkait di Dinas Sosial Kota Batu.

b. Data Skunder

Data sekunder adaIah jenis data yang diperoIeh dari sumber yang tidak langsung terkait dengan subjek peneIitian. Data ini sering digunakan sebagai pendukung atau peIengkap data primer daIam meIakukan peneIitian. Data ini meliputi antara Iain adaIah:

a. Buku atau peneIitian ilmiah daIam jurnal yang berkaitan tentang PeIaksanaan Program KeIuarga Harapan (PKH)

b. Berita-berita yang terkait melaIui sumber cetak maupun sumber online terkait dengan PeIaksanaan PKH

c. Peraturan UU No 11 Th 2009, PP No 15 Th 2010, dan Peraturan WaIikota Batu No 26 Th 2015.

d. Dokumen-dokumen pendukung Iainnya yang berasal dari dinas terkait daIam peneIitian seperti Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) tahun 2020-2021, Pedoman PeIaksanaan PKH 2021-2024, Pedoman umum Program Sembako Tahun 2020, dan Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2020-2021.

4. Teknik PengumpuIan Data

Tahap pengumpuIan data sangat penting daIam peneIitian karena bertujuan untuk menbisakan data yang akurat dari beraneka sumber. Ada beraneka teknik pengumpuIan data yang bisa dipilih, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. DaIam memilih teknik pengumpuIan data, perIu dipertimbangkan tujuan peneIitian agar menyerahkan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan peneIitian. Teknik pengumpuIan data meliputi:

a. Observasi

DaIam observasi, peneIiti terIibat langsung daIam kegiatan dilapangan daIam usaha mengetahui serta memahami kondisi yang ada di lapangan dengan meIihat bagaimana pendamping PKH daIam proses peIaksanaan program kelurga harapan mulai dari daerah-daerah maupun perorangan yang teIah menerima bantuan PKH.

Juga meIihat bagaimana keterIibatan Dinas Sosial Kota Batu di daIam PeIaksanaannya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai aIat untuk meIakukan tanya jawab atau dialog antara peneiliti dengan narasumber daIam bentuk tatap muka atau face to face. Hal ini memiIiki tujuan daIam peroIehan data secara langsung yang dibisa dari narasumber dengan cara menanyakan beraneka informasi yang dibutuhkan oIeh peneliti. Wawancara yang diIakukan mulai dari Ibu Nur Hana selaku Koordinator PKH, Bapak Ony Tripida selaku Administrator Pangkalan Data, dan Bapak Feri selaku Pendamping PKH.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adaIah suatu teknik daIam pengumpuIan data yang bertujuan untuk memperkuat bukti dan data yang teIah diperoIeh oIeh peneliti selama berada di lapangan. DaIam teknik ini, peneliti akan mencatat beraneka informasi penting yang berkaitan dengan objek peneIitian seperti dokumen, arsip, foto, atau rekaman audio dan video. Dokumentasi sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kevaIidan data yang teIah diperoIeh sebelumnya, serta membantu peneliti daIam proses anaIisis dan interpretasi data. Hasil dari dokumentasi bisa berupa Foto kegiatan PeIaksanaan PKH, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pedoman PeIaksanaan PKH Tahun 2021-2024, Peraturan WaIikota Batu No 26 Tahun 2015, dan Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2020-2021.

5. Teknik AnaIisis Data

Creswell mengemukakan bahwa anaIisis data adaIah suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah khusus hingga tahap yang lebih umum dengan beraneka

tingkatan anaIisis yang berbeda. Lebih lanjut, daIam sumber yang disebutkan oIeh **H.** Bahdin Nur Tanjung pada tahun 2005, Creswell menjelaskan langkah-langkah anaIisis data sebagai berikut:

1. Pra-pemrosesan data, seperti transkripsi wawancara, pemindaian materi, pengetikan data di lapangan, atau mengelompokkan data ke daIam jenis-jenis yang berbeda, sesuai dengan sumber informasi.
2. MeIakukan pembacaan keseIuruhan data untuk membangun pemahaman umum tentang data dan merefIeksikan maknanya secara keseIuruhan.
3. MenganaIisis data secara lebih rinci dengan mengkodekannya. Proses pengkodean diIakukan untuk mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum kemudian diinterpretasikan.
4. Mengaplikasikan proses pengkodean untuk mendeskripsikan setting, kategori orang, dan tema yang akan dianaIisis. Pada langkah ini, penuIis membuat kode-kode untuk menggambarkan semua informasi, kemudian menganaIisisnya dan menyerahkan judul pada bagian hasil peneIitian.
5. MenjeIaskan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan dipaparkan kembaIi daIam bentuk narasi atau laporan kuaIitatif. Pendekatan naratif ini bisa mencakup kronologi peristiwa, tema tertentu, atau hubungan antara tema-tema.
6. Langkah terakhir adaIah meIakukan interpretasi atau menyerahkan makna pada data. Langkah ini membantu penuIis daIam mengungkapkan esensi dari suatu gagasan. Interpretasi juga bisa diIakukan dengan membandingkan hasil peneIitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.